

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paska berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (Rusia), sistem internasional mengalami perubahan yang sangat signifikan. Agenda politik yang biasanya berfokus pada kekuatan militer dan keamanan negara sekarang didominasi oleh aktor-aktor yang menginginkan tatanan global yang stabil, damai serta kondusif untuk pembangunan ekonomi mereka.¹ Sistem tatanan dunia juga mengalami perubahan yang awalnya adalah bipolar selama perang dingin kemudian menjadi lebih multipolar paska perang dingin berakhir. Perbedaan kepentingan antar negara dalam hubungan internasional telah membentuk banyak hubungan bilateral dan multilateral yang membuat situasi dunia menjadi semakin rumit dan kompleks. Perubahan ini juga dirasakan oleh banyak negara termasuk Vietnam.

Vietnam merupakan satu dari sedikit negara di Asia Tenggara yang berideologi komunis. Dalam politik dalam negeri hal ini ditandai dengan adanya sistem satu partai yang dianut oleh Vietnam yaitu VCP (*communist party of Vietnam*) yang mengklaim diri mereka sebagai barisan terdepan para kelas pekerja Vietnam dan representasi yang loyal dari kepentingan para kelas pekerja dari seluruh negeri sesuai dengan ajaran Marxis-lenin.² Sistem satu partai ini membuat tidak adanya pemisahan

¹ Maqbool Ahmad Bhatti, "Great Powers and South Asia: Post Cold War Trends", Islamabad, 1996, hal 4

² Nadina Mensel, "A Tiger Ready to Pounce? Vietnam's economic and Political Coordinates in Southeast Asia", diakses dari <http://www.kas.de/wf/en/33.19453/>, hal 2

antara partai politik, pembuat kebijakan dan pemerintah sehingga VCP mampu untuk mendominasi presiden, perdana menteri serta dewan nasional.

Ideologi komunis ini juga tercermin dalam kebijakan luar negeri Vietnam. Vietnam mengejar komitmen internasional dibawah aturan Marxis-lenin seperti gerakan komunis internasional serta aksi melawan kapitalis dan imperialis. Vietnam mengidentifikasi lawan dan kawan berdasarkan ideologi.berdasarkan pemisahan dunia ke dalam “two poles” (dua kutub) dan “two sides” (dua sisi),³ Berdasarkan hal ini Vietnam memilih kebijakan luar negeri yang tertutup bagi negara-negara kapitalis barat terutama Amerika Serikat dan lebih mendekati diri pada negara-negara komunis seperti Uni Soviet.

Tahun 1975 terjadi perang sipil di Vietnam yang dikenal dengan perang Vietnam. Perang ini menjadi salah satu perang penting dalam sejarah Vietnam dan bagi kedua blok yang sedang berseteru saat perang dingin yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bagi Vietnam perang ini merupakan salah satu jalan untuk kembali menyatukan Vietnam yang telah lama terbelah dua menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dengan menggunakan ideologi yang berbeda pula. Perbedaan ideologi ini juga kemudian menentukan sekutu dari masing-masing kubu. Disinilah peran dari Amerika Serikat dan Uni Soviet terlihat sebagai aliansi dari kedua kubu. Uni Soviet dan negara komunis lainnya seperti Korea Utara dan China membantu Vietnam Utara yang berideologi sama yaitu komunis. Sedangkan Vietnam Selatan

³ Gareth Porter, *The Transformation of Vietnam's Worldview: From Two Camps to Interdependence*, Contemporary Southeast Asia Vol.19, no.1, Juni 1990, hal

dibantu oleh Amerika Serikat, Australia dan Thailand. Perang ini diakhiri dengan kemenangan di tangan Vietnam Utara dan unifikasi kedua Vietnam dan Vietnam seutuhnya menjadi negara komunis.⁴

Unifikasi ternyata tidak membawa dampak baik Vietnam seperti yang diharapkan. Setelah perang berakhir Vietnam memfokuskan kebijakan pada upaya pembangunan dan rekonstruksi bangunan yang hancur akibat perang. Selain itu Vietnam juga fokus untuk melakukan transformasi sosialis di Vietnam Selatan dalam ekonomi maupun politik serta mengganti nama negara dari Republik Demokrasi Vietnam (*Democratic Republic of Vietnam*) menjadi Republik Sosialis Vietnam (*Socialist Republic of Vietnam*).⁵ Kebijakan ini merupakan rangkaian dari *five years master plan* (rencana kerja lima tahun) yang dikeluarkan oleh VCP setelah unifikasi dari tahun 1976-1980. Kebijakan lain yang dikeluarkan Vietnam adalah dibidang ekonomi dengan berpindah dari produksi skala kecil ke produksi skala besar tanpa harus melewati tahap kapitalis yang bertujuan untuk memberikan prioritas pada industri berat dan menjadikan Vietnam negara sosialis dengan agrikultur dan industri modern.⁶

Kebijakan ekonomi Vietnam ini ternyata mengalami kegagalan dan mengakibatkan penurunan ekonomi Vietnam. Pemerintah Vietnam mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan politik sosialis di

⁴ Bao Pham, "The Economic reform in Vietnam in 1989: Shock Therapy or Gradualism?", University of Sandiago, California, 2003, hal 8

⁵ Bao Pham, hal 9

⁶ Binh Nam Tran, "Economic Liberalization and Vietnam's Long-term Growth Prospect", Australian Tx Studies Program, University of New South Wales, 1998, Hal 10

kawasan selatan yang menganut sistem liberal dan demokrasi sebelumnya. Dalam bidang agrikultur para petani menolak untuk menyerahkan lahannya pada pemerintah, perusahaan-perusahaan privat juga menolak untuk menyerahkan perusahaan ke pemerintah. Akibatnya produksi pangan mengalami penurunan sehingga terjadi kelaparan dan malnutrisi. Kegagalan ini membuat Vietnam mencari bantuan dari luar dengan membuat kebijakan luar negeri yang lebih komprehensif dengan aliansi strategis yaitu Uni Soviet dan negara sosialis lainnya sebagai pemberi bantuan terbesar bagi mereka. Tahun 1978 setelah reunifikasi Vietnam bergabung dengan aliansi dengan negara-negara sosialis yang ditandai dengan ditandatanganinya COMECON (*Socialist Economic Community*) dan 25 year of Friendship and Cooperation Treaty dengan Uni Soviet yang merupakan kerjasama di bidang militer.⁷

Penandatanganan perjanjian tersebut membawa banyak dampak buruk bagi Vietnam salah satunya adalah memburuknya hubungan China yang saat itu sedang mengalami konflik perbatasan dengan Uni Soviet yang berujung pada pemberhentian bantuan oleh China. Tahun 1979 Vietnam melakukan Invansi ke Kamboja yang didukung oleh Uni Soviet. Invansi ini mendapat kecaman keras dari dunia internasional yang diwujudkan dalam bentuk embargo secara ekonomi dan isolasi dalam konteks hubungan internasional dengan negara-negara barat dan sekutunya.⁸ Sanksi ini berdampak pada memburuknya hubungan diplomasi Vietnam dengan banyak negara di dunia. Pada saat yang bersamaan Uni Soviet dan negara komunis

⁷ Luong Ngoc Thanh, “*Vietnam’s Foreign Policy in The Post Cold War Era: Ideologi and Reality*”, Hiroshima University, 2013, hal 55

⁸ Thanh, hal 56

lain nya di Eropa mengalami kemunduran ekonomi dan ketidakstabilan sosial pada tahun 1983 yang berdampak pada pemberhentian pemberian bantuan pada Vietnam.⁹

Embargo yang dilakukan oleh negara-negara barat terutama Amerika Serikat akibat pendudukan Kamboja yang dilakukan oleh Vietnam menyebabkan tidak adanya investasi yang masuk ke Vietnam dan telah memperburuk keadaan perekonomian Vietnam. Biaya perang yang mahal, subsidi terhadap perusahaan-perusahaan negara serta rekonstruksi bangunan paska perang menyebabkan terjadi hyperinflasi hingga 700% dan pertumbuhan ekonomi pertahun rata-rata hanya 3% dan menyebabkan defisit dalam anggaran Vietnam.¹⁰

Pada kongres partai ke-6 VCP Desember 1986 mengumumkan pada publik bahwa Vietnam membutuhkan reformasi ekonomi dari *centrally planned economic system* (sistem ekonomi terpusat) menjadi *mixed market economy* (multisektor pasar ekonomi).¹¹ Peran sector privat akan diakui dalam ekonomi dan diberikan kesempatan untuk bersaing dengan negara dalam sector non-startegis. Termasuk juga perjanjian untuk mereformasi kebijakan dengan tujuan untuk mengurangi ketidakstabilan makro ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan semua hal yang bisa mengangkat ekonomi. Paket kebijakan ini dikenal dengan *Doi Moi*

⁹ Thanh, hal 122

¹⁰ Arkadie Mallon.et.el, “*Vietnam: A Transition Tiger*”, Asia Pacific Press, January 2004

¹¹ Vo Tri Thanh, “*Process of economic Reforms in Vietnam: What Lessons We Have Learnt From?*”, Honngkong Univ. of Science and technology, Hongkong, 2005, hal 10

yang diluncurkan pada 1986 setelah perdebatan dan diskusi yang sangat panjang antara elit politik dan ekonomi Vietnam.¹²

Doi Moi merupakan paket kebijakan yang radikal dan komprehensif yang bertujuan untuk menstabilkan dan membuka ekonomi, meningkatkan kebebasan untuk memilih unit-unit ekonomi dan kompetisi sebagai cara untuk mereformasi sistem manajemen ekonomi. *Doi Moi* berisi beberapa rencana perubahan pembangunan ekonomi Vietnam untuk beberapa tahun kedepan yang bertujuan untuk memodifikasi ekonomi, administrasi yang bersifat desentralisasi dan membuka Vietnam pada pasar global.¹³ Reformasi itu mencakup :

1. Liberalisasi harga (*price liberalization*)
2. Devaluasi secara besar-besaran dan penyatuan mata uang
3. Meningkatkan suku bunga ke tingkat positif secara riil
4. Pengurangan secara substansial subsidi pada sektor BUMN
5. Reformasi Agrikultur
6. Dorongan untuk sektor privat termasuk FDI (*foreign direct investment*)
7. Penghapusan hambatan perdagangan domestik dan menciptakan ekonomi yang lebih terbuka.

Hal ini diimplikasikan pada beberapa kebijakan berupa meliberalisasi perdagangan dan memobilisasi sumber daya untuk pembangunan yang pertama kali dilakukan untuk bidang agrikultur kemudian sektor industri dan servis serta jasa

¹² Mallon, hal 2

¹³ Nguyen Thu Tuy et al., "*Exploring Vietnam's progress in economic growth*", Swiss Programme for Research on Global Issues for Development, 2015, hal 10

sebagai usaha untuk membawa inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali (hyperinflasi) menjadi lebih terkontrol. Sejalan dengan reformasi ekonomi, percepatan integrasi ekonomi internasional memainkan peran penting dalam mencari pasar untuk ekspor, memperbesar angka investor yang potensial, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan (table 1)

Data pertumbuhan ekonomi Vietnam 1986-2016 (GDP per tahun)



Sumber: World Bank¹⁴

Reformasi ini juga membawa perubahan pada orientasi kebijakan luar negeri Vietnam. Orientasi kebijakan luar negeri Vietnam berubah menjadi multilateral dengan kata lain Vietnam secara bertahap mulai mengurangi ketergantungannya terhadap Uni Soviet dan mulai menegaskan kemandirian kebijakan luar negerinya. Selain itu Vietnam juga menegaskan bahwa hubungan multilateral penting bagi stabilitas dan pembangunan Vietnam. Hal ini membawa hasil yang positif bagi

¹⁴ Vietnam GDP, <http://www.tradingeconomics.com/vietnam/gdp>, diakses pada 27 februari 2017

kebijakan luar negeri Vietnam dan meningkatkan hubungan Vietnam dengan negara-negara luar.¹⁵

Vietnam telah secara substansial meliberalisasi kebijakan perdagangan dan investasi sejak akhir tahun 1980-an. Liberalisasi ekonomi yang dilakukan Vietnam mendapatkan respon yang positif dari dunia internasional. Pada 1992 Jepang dan komunitas donor yang terdiri dari negara-negara maju serta institusi internasional memberikan bantuan pembangunan resmi (ODA) bagi Vietnam. Bantuan ini sangat membantu dalam memacu pembangunan infrastruktur dalam perencanaan pemerintah Vietnam. Dampak liberalisasi ekonomi Vietnam juga terlihat dari banyaknya FDI yang masuk dan selalu meningkat setiap tahunnya terutama berasal dari Jepang dan negara-negara industri baru (NIC). Dampak lainnya dari liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh Vietnam adalah kembalinya kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi internasional setelah AS menghentikan embargo ekonominya pada tahun 1994.

Sejak dikeluarkannya *Doi Moi* Vietnam telah secara konsisten mengejar integrasi ekonomi internasional yang lebih luas dan dalam sebagai upaya untuk mendukung ekonominya yang telah tertuang dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh CPV yang menekankan pentingnya integrasi internasional sebagai alat untuk membangun negara.¹⁶ Integrasi ini merupakan bagian dari liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh Vietnam. Liberalisasi perdagangan Vietnam diwujudkan melalui

¹⁵ Vu Khoan, “*Integrating into the World and preserving Our national Identity*”, Security, Development and Influence in International Relations, Vietnam Foreign Ministry, Hanoi, 1995, hal 5

¹⁶ Le Hong Hiep, “*The TPP’s Impact on Vietnam: A Preliminary Assessment*”, Yusof Ishak Institute. Singapore, November 2015, Hal 3

ikut serta secara aktif ke dalam berbagai rezim perdagangan bebas bilateral maupun multilateral. Vietnam telah bergabung dalam perjanjian perdagangan dengan 60 negara dan telah memiliki hubungan perdagangan dengan 170 negara di dunia. Vietnam telah mengimplementasi perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa sejak 1992. Selain itu Vietnam juga telah menjadi anggota ASEAN sejak 1995 dan APEC pada 1998. Hingga saat ini Vietnam telah tergabung ke dalam 14 FTA bilateral maupun Multilateral dalam kawasan maupun luar kawasan.¹⁷ Vietnam menganggap bahwa kebijakan luar negeri yang lebih multidirection merupakan upaya untuk memanfaatkan institusi yang ada demi mencapai kepentingan ekonomi sendiri sembari saling ketergantungan secara ekonomi.

Salah satu rezim perdagangan bebas yang ingin sekali diikuti oleh Vietnam adalah WTO. WTO mendaftar untuk menjadi anggota WTO sejak tahun 1995 dan baru diresmikan untuk menjadi anggota tahun 2007. Proses yang lama ini disebabkan oleh proses transisi ekonomi yang sedang dilakukan oleh Vietnam pada saat itu yang harus menyesuaikan pada sistem ekonomi terutama perdagangan yang sangat liberal. Prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Vietnam agar dapat bergabung dalam WTO akan membantu Vietnam dalam meliberalisasi perdagangannya.

¹⁷ Lani Pujiastuti, "Cerita Vietnam soal Syarat Berat Perjanjian TPP", diakses dari <http://finance.detik.com/read/2015/12/10/210618/3092943/4/cerita-vietnam-soal-syarat-berat-perjanjian-tpp>, 24 mei 2016

1.2 Rumusan Masalah

Setelah reunifikasi pada tahun 1975, Vietnam lebih fokus pada rekonstruksi dan pembangunan ekonomi paska perang. Kegagalan reformasi ekonomi serta sistem ekonomi yang masih terpusat memaksa Vietnam untuk melakukan reformasi pada tahun 1980-an. Tapi reformasi ini tetap tidak membawa perubahan pada kemajuan ekonomi Vietnam. Kondisi ekonomi yang masih dan semakin terpuruk membuat pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan reformasi yang lebih besar yang dikenal dengan Doi Moi tahun 1986. Doi Moi merupakan titik balik bagi sejarah perekonomian Vietnam dengan mengubah sistem ekonomi Vietnam menjadi lebih berorientasi pada pasar (*market oriented*). Transisi ini membuat Vietnam harus menyesuaikan beberapa hal, seperti: liberalisasi dan stabilisasi, perubahan institusi yang mendukung pasar dan kebijakan kepemilikan, serta pembuatan program yang akan membantu masyarakat untuk melewati masa transisi ini. Kebijakan liberalisasi ini juga berdampak pada kebijakan luar negeri Vietnam yang menjadi lebih terbuka dan mengejar integrasi ekonomi dengan banyak negara serta aktif ikut serta dalam banyak perjanjian perdagangan bebas sebagai cara untuk memikat investor yang akan membantu pembangunan dan pemulihan ekonomi Vietnam yang salah satunya adalah bergabung dalam WTO. Bagaimana kebijakan luar negeri Vietnam untuk meliberalisasi perdagangannya melalui WTO akan menjadi topik yang menarik untuk dibahas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana kebijakan luar negeri Vietnam dalam mewujudkan liberalisasi perdagangan melalui rezim perdagangan bebas WTO?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Vietnam dalam mewujudkan liberalisasi perdagangannya melalui rezim perdagangan bebas WTO

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan tentang reformasi Doi Moi di Vietnam
2. Menambah informasi tentang kebijakan luar negeri Vietnam dalam meliberalisasi perdagangan melalui rezim perdagangan bebas

1.6 Studi Pustaka

Tulisan yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yang pertama adalah *The Diplomacy of Economic Reform in Vietnam: The Genesis of Doi Moi 1986-1989* oleh Balazaa Szalontai. Dalam tulisan ini Szalontai membahas mengenai proses lahirnya Doi Moi sebagai paket kebijakan reformasi bagi Vietnam. Pada tahun 1979-1987 Vietnam mengalami masa-masa yang sulit dan pemerintah Vietnam menggunakan berbagai cara untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut. Vietnam terus mengalami deficit yang disebabkan oleh dua hal, yaitu biaya militer dan subsidi yang diberikan pada konsumen dan BUMN. Pemerintah melakukan berbagai upaya dengan mereformasi sector-sector utama ekonomi. Usaha tersebut adalah dengan meningkatkan produksi agrikultur untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap impor, pengembangan sektor energy juga dilakukan dengan

tujuan untuk mengurangi ketergantungan Vietnam terhadap impor minyak, penambahan pajak pada perusahaan-perusahaan privat, penambahan insentif terhadap ekspor, dan mengeliminasi subsidi.

Biaya untuk militer juga merupakan penyebab terjadinya deficit dalam anggaran Vietnam yang tidak dapat diganggu gugat hingga tahun 1988. Pengeluaran yang tinggi dalam bidang militer ini disebabkan oleh keterlibatan Vietnam dalam beberapa perang selama beberapa dekade terakhir. Keadaan politik dalam negeri yang tidak stabil juga membuat para investor tidak berani untuk melakukan investasi di Vietnam. Akibatnya terjadilah inflasi yang cukup tinggi dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada masa-masa tersebut Vietnam masih memiliki konflik dengan banyak negara di kawasan Asia tenggara yang juga membuat pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Hubungan yang tidak harmonis ini juga disebabkan oleh belum adanya reformasi rezim pemerintahan di dalam Vietnam yang masih tetap pada kebijakan luar negeri yang anti kapitalis dan lebih dekat pada negara-negara komunis-sosialis.

Tahun 1986 pemerintah Vietnam akhirnya mengeluarkan rangkaian kebijakan yang diharapkan mampu untuk memperbaiki keadaan ekonomi saat itu yang dikenal dengan nama *Doi Moi*. Kebijakan ini juga menjadi penanda terhadap terjadinya reformasi tidak hanya pada ekonomi Vietnam tapi juga pada kebijakan luar negerinya. Vietnam berubah menjadi negara dengan ekonomi yang lebih terbuka dan politik luar negeri yang lebih ramah, hal ini dibuktikan Vietnam dengan memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan dan negara-negara barat lainnya.

Kebijakan ini dengan perlahan mampu untuk kembali meningkatkan ekonomi Vietnam, inflasi menurun, investasi dari negara-negara luar mulai masuk. Jurnal ini akan membantu peneliti untuk memahami latar belakang lahirnya kebijakan Doi Moi ini.

Dampak dari integrasi yang dilakukan oleh Vietnam dengan negara-negara kawasan dibahas dalam *Impact of East Asian Integration on Vietnam* yang ditulis oleh Nguyen Tien Dung. Dalam tulisannya ini Dung mencoba untuk menganalisa dampak dari berbagai integrasi di kawasan Asia Timur terhadap Vietnam. Liberalisasi perdagangan yang telah dilakukan oleh Vietnam selama dua dekade terakhir telah membangun perdagangan dan relasi investasi yang lebih mendalam dengan negara-negara Asia Timur. Integrasi Vietnam dengan ekonomi regional diwujudkan dengan bergabungnya Vietnam ke dalam berbagai FTA di kawasan.

Bergabungnya Vietnam ke dalam berbagai integrasi ekonomi merupakan implementasi kebijakan “*open-door*” dalam bentuk perdagangan yang lebih progresif dan reformasi investasi. Negara Asia Timur merupakan negara rekan dagang utama bagi Vietnam. Sejak tahun 1990-an negara Asia Timur telah menjadi sumber impor mesin dan produsen material serta setengah dari pasar ekspor Vietnam. Sumber FDI terbesar Vietnam juga berasal dari negara-negara Asia Timur. Usaha Vietnam untuk melakukan Integrasi ekonomi kawasan dimulai sejak tahun 1995 saat Vietnam memutuskan untuk bergabung dengan ASEAN dan kemudian diikuti dengan keanggotaannya dalam APEC pada tahun 1998. Sebagai member ASEAN, Vietnam

telah berpartisipasi dalam membentuk FTA antara SEAN dengan Jepang, China dan Korea.

Meningkatnya integrasi Vietnam dengan kawasan telah memberikan Vietnam dampak yang cukup positif dengan memberikan kesempatan bagi Vietnam untuk mendapatkan akses pasar yang lebih besar untuk ekspor dan aliran FDI yang lebih besar. Selain dampak positif tersebut, Vietnam juga mengalami tekanan mengenai dampak dari integrasi ini. Tekanan ini terjadi pada para produsen dalam negeri yang mengalami peningkatan kompetisi akibat adanya pengurangan tariff. Hal ini sempat menjadi perhatian bagi pemerintah Vietnam. Penelitian ini akan membantu penulis untuk memahami proses Integrasi Vietnam dan dampaknya terhadap perekonomian Vietnam. Sebagai negara berkembang, integrasi dan liberalisasi akan membantu Vietnam untuk meningkatkan ekonominya dengan cara ekspansi pasar untuk ekspor dan menambah kepercayaan dari investor untuk melakukan investasi di Vietnam.

Liberalisasi ekonomi sebagai salah satu kebijakan penting dalam Doi Moi juga dijelaskan oleh Van Hoa dalam tesisnya yang berjudul *Vietnam's Trade Liberalization and Accession to The WTO*. Dalam tesisnya ini Hoa mencoba untuk menjelaskan beberapa hal seperti yang pertama bagaimana prinsip-prinsip WTO berimplikasi pada liberalisasi perdagangan Vietnam. Menjadi anggota WTO merupakan kesempatan dan sekaligus tantangan bagi Vietnam. Tantangan berasal salah satunya adalah banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah negara agar bisa bergabung dalam WTO dimulai dari kesanggupan negara untuk mematuhi

prinsip-prinsip, syarat masuk dan prosedur formal yang harus diikuti. Bagi negara dengan sistem ekonomi sosialis dan terpusat biasanya juga akan ada penentangan dari para elit politik dalam negeri yang merasa akan kehilangan keuntungan akibat perubahan tersebut. Tapi dibalik tantangan tersebut terdapat banyak keuntungan yang akan didapat oleh Vietnam bergabung dalam WTO, diantaranya adalah akses yang lebih luas untuk melakukan ekspor dengan negara-negara anggota, tersedianya mekanisme penyelesaian perselisihan dan pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih disiplin.

Prinsip-prinsip dalam sistem perdagangan WTO antara lain adalah yang pertama mengenai perdagangan tanpa diskriminasi. WTO memfokuskan salah satu prinsipnya pada tidak adanya diskriminasi pada negara-negara anggota. Semua negara dibawah naungan WTO mendapatkan perlakuan yang sama, negara tidak dapat mendiskriminasikan rekan dagang seperti memenuhi permintaan khusus dari satu negara. Kebijakan merupakan kebijakan yang dibutuhkan oleh semua negara dan menjadi daya tarik bagi negara-negara untuk bergabung dalam WTO. Yang kedua adalah *national treatment* dimana negara harus memperlakukan produk-produk impor dan produk dalam negeri sama. Hal ini diimplementasikan pada servis domestik dan internasional, untuk brand nasional dan internasional. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri dan dalam negeri. Prinsip yang ketiga adalah perdagangan bebas yang bertahap melalui negosiasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil hambatan perdagangan. Hambatan itu berupa tarif atau pajak serta larangan impor serta kuota impor. Yang

terakhir adalah penyelesaian sengketa yang terjadi antara negara-negara anggota WTO.

Salah satu prinsip WTO yang akan memberikan keuntungan bagi Vietnam adalah jaminan bahwa negara-negara eksportir tidak akan mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh negara anggota WTO lainnya dalam hal akses pasar. Hal ini penting bagi Vietnam sebagai negara yang sedang melakukan transisi, karena Vietnam tidak perlu untuk pergi meminta status MFN kepada pemerintah Amerika Serikat setiap tahunnya. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran prinsip dan aturan yang ada dalam WTO juga akan memberikan keuntungan bagi para anggotanya termasuk Vietnam. Hal kedua yang dibahas dalam tesis ini adalah faktor-faktor yang membuat Vietnam membutuhkan waktu cukup panjang bagi Vietnam untuk bergabung dalam WTO. WTO merupakan rezim perdagangan bebas terbesar di dunia yang memiliki prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang sangat komplis. Ekonomi yang terbuka dan liberal merupakan salah satu syarat untuk dapat bergabung dalam WTO. Lamanya waktu yang dibutuhkan Vietnam untuk masuk dalam WTO dikarenakan beberapa alasan dasar yaitu penyesuaian kebijakan dengan syarat-syarat bergabung dengan WTO. Penelitian ini akan membantu peneliti untuk memahami bagaimana penyesuaian yang dilakukan oleh Vietnam untuk bergabung dalam sebuah rezim perdagangan bebas sebagai bentuk implementasi liberalisasi perdagangan Vietnam.

Perubahan kebijakan luar negeri Vietnam juga dijelaskan oleh Alexander Lam Vuing dalam disertasi nya yang berjudul *The Shaping of Foreign Policy :*

Vietnamese Grand Strategy After the Cold War. Pada akhir 1986 Vietnam mengadopsi sebuah proses reformasi yang masih bertahan sampai saat ini. Sejak diterapkannya reformasi tersebut, kebijakan luar negeri Vietnam telah mengalami 5 tahap perubahan strategis. Yang pertama ditandai dengan adanya pengadopsian resolusi 13 Politburo pada Mei 1988. Solidaritas dengan negara-negara sosialis dan aliansi dengan Uni Soviet telah menjadi fokus penting dalam kebijakan luar negeri Vietnam sebelumnya, tapi resolusi terbaru membawa orientasi baru yang dikenal dengan “*diversified* dan *multidirectional*” yang merupakan penyesuaian dari kompleksnya sistem dunia saat ini yang ditandai dengan multipolar, saling ketergantungan, internasionalisasi dan regionalism. Kebijakan baru ini dimaksudkan untuk menormalisasi hubungan dengan China dan Amerika Serikat, integrasi yang lebih mendalam dengan negara-negara Asia Tenggara dan sikap untuk mengakhiri keterlibatan Vietnam di Kamboja.

Yang kedua ditandai dengan peristiwa Tiananmen di China dan jatuhnya rezim komunis di Eropa Timur pada tahun 1988 telah memberikan dampak yang besar bagi stabilitas Vietnam. Pemimpin Vietnam mengalami kebingungan untuk menentukan arah politik Vietnam. Pada satu sisi sosialis di Vietnam mengalami krisis karena pemimpin partai telah mengabaikan perkembangan baru yang terjadi di kawasan barat dan gagal untuk bekerjasama dengan negara-negara kapitalis tersebut dan berintegrasi dengan ekonomi dunia. Pandangan lain menyalahkan Amerika Serikat dan negara barat lainnya atas runtuhnya rezim sosialis. Setelah perdebatan

selama enam bulan lamanya, Vietnam melakukan modernisasi tapi masih tetap seiring dengan ajaran Marxis-lenin yang didukung oleh partai.

Orientasi strategi yang ketiga adalah kebijakan luar negeri Vietnam pada tahun 1992 sebagai bentuk respon dari situasi yang terjadi pada tahun 1991. Pada 1991 Uni Soviet mengalami perpecahan, China menolak permintaan Vietnam untuk beraliansi dan Amerika Serikat menolak Vietnam untuk bekerjasama melawan pengaruh China. Menggapi hal ini kemudian Vietnam mengambil langkah lain dengan mencoba untuk melakukan integrasi dengan negara-negara yang berada dalam satu kawasan terlebih dahulu seperti ASEAN dan Asia-Pasifik. Yang keempat terjadi pada tahun 1999-2000 dimana Vietnam mengeluarkan kebijakan yang akan lebih memihak dan bersandar pada China sebagai dampak dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998. Akibat dari krisis ini negara-negara ASEAN mengalami pelemahan ekonomi sedangkan China tetap stabil menghadapi krisis tersebut. Hal ini membuat Vietnam memiliki alasan untuk dapat berpaling dari ASEAN menuju China.

Yang terakhir adalah perubahan strategis terhadap kebijakan luar negeri Vietnam sejak pertengahan tahun 1980-an hingga 2003 dimana ini merupakan bentuk penyesuaian Vietnam terhadap situasi global yang sedang terjadi saat itu. Vietnam mengganti kebijakan luar negerinya yang dahulu pragmatis yang menentukan lawan dan kawan berdasarkan ideologi yang kini berubah menjadi lebih terbuka tanpa membedakan ideologi. Tahap-tahap perubahan kebijakan luar negeri Vietnam ini akan membantu penulis untuk memahami proses perubahan kebijakan luar negeri dari sebelum reformasi Doi Moi hingga sekarang.

Keadaan ekonomi Vietnam setelah reformasi dijelaskan oleh Ngoc Huyen dan Anh Tuan dalam jurnal nya yang berjudul *Vietnam's economic evelopment: Opportunities and Challenge towards the Integration Tendency*. Vietnam telah menjadi negara yang menyaksikan sendiri bagaimana perubahan fundamental selama 13 tahun reformasi yang komprehensif menuju pasar dan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas makroekonomi dan prospektif, kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dalam bisnis merupakan faktor yang membuat Vietnam menarik bagi para investor-investor luar. Pemerintah Vietnam menyadari bahwa perubahan lebih lanjut diperlukan untuk memenuhi tugas untuk berubah menjadi ekonomi pasar, menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, dan integrasi ekonomi yang lebih komprehensif.

Perdagangan bebas dan investasi telah membantu pertumbuhan ekonomi Vietnam. Untuk mempertahankan hal tersebut pemerintah Vietnam harus menentukan beberapa prioritas diantaranya: (1) membangun perusahaan untuk menghindari monopoli perusahaan milik negara, memperluas dan memperkuat hubungan antara distributor, manufaktur dan supplier dalam rantai perdagangan. Yang kedua adalah dengan memberikan insentif untuk meningkatkan industri ekspor. Yang ketiga mempromosikan produksi faktor pasar, keempat memperluas perdagangan asing dan secara aktif berintegrasi secara ekonomi dan yang kelima memodernisasi proses administrasi negara.

Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam proses transformasi ini. Dengan adanya penguatan kebijakan dalam pembangunan perusahaan,

penghapusan sistem monopoli pada perusahaan milik negara, pembangunan sektor pasar, stabilisasi makroekonomi, serta integrasi ekonomi dengan dunia akan membantu Vietnam untuk mencapai keuntungan dari kesempatan yang telah tersedia dalam globalisasi ini.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Konsep Perilaku dan Implementasi Kebijakan Luar Negeri

Jack Plano dan Roy Olton berpendapat bahwa Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam bentuk kepentingan nasional. Menurut Plano setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau kepentingan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya.¹⁸ Kaum liberalis memberikan kontribusi dalam kebijakan luar negeri untuk menjelaskan bagaimana individu, kekuatan sosial (kapitalisme dan pasar), dan institusi politik bisa memberikan efek langsung kepada hubungan luar negeri.¹⁹

Lebih lanjut Modelski menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan aktifitas system yang ditingkatkan oleh komunitas untuk mengubah perilaku negara

¹⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*,

¹⁹ Steve smith, Amelia Hadfield and Tim Dunne, *Foreign Policy: Theories, Actors and Cases*”, Oxford University, 2008, Hal 54

lain dan untuk menyesuaikan aktifitas negara itu sendiri terhadap lingkungan internasional.²⁰ Perilaku ini akan mengarah pada meminimalkan tindakan-tindakan yang merugikan dan memaksimalkan kerjasama. Sejalan dengan itu Jensen juga menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan pola sikap dan tingkah laku yang diambil oleh negara untuk berinteraksi dengan komunitas internasional.²¹ Setiap negara berusaha untuk menyusun prioritas-prioritas dan mendesain kebijakan-kebijakan yang memungkinkan untuk dicapainya tujuan dan sasaran sebuah negara.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang *feedback* dari implementasi kebijakan luar negeri Vietnam yang menggunakan konsep perilaku dan implementasi yang dikembangkan oleh Elisabetta Brighi dan Cristopher Hill dalam buku *Foreign Policy: Theories, Actor, Cases*.²² Brighi dan Hill menjelaskan implementasi kebijakan luar negeri menggunakan pendekatan *strategic-relational*²³ yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri dihasilkan melalui interaksi dialektis antara strategi aktor dan konteks. Pendekatan ini disebut sebagai *strategic* Karena aktor dipahami akan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan *relational* mengacu pada asumsi pendekatan ini yang mengatakan bahwa aktor dan perilaku mereka menjadi dapat dimengerti ketika dianalisis dalam hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan SR ini mempertimbangkan tiga hal dalam penerapannya, yaitu pendefinisian ide, aktor dan konteks, hubungan saling mempengaruhi antara aktor dan konteks, serta *feedback* dari aktor ke konteks dan

²⁰ George A Modelski, “*A Theory of Foreign Policy*”, New York: Fredrick A Praeger, 1962, hal 6

²¹ Lloyd Jensen, “*Explaining foreign Policy*”, New Jersey: Prentice-hall, 1988 , hal 14

²² Smith, hal 118-131

²³ Ibid, hal 119

sebaliknya.²⁴ Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa untuk memahami mengenai *feedback* sebuah implementasi kebijakan luar negeri sebuah negara maka perlu untuk memahami ide, aktor, dan konteks serta hubungan saling mempengaruhi antara mereka terlebih dahulu.

a. Ide, Aktor dan Konteks

Pendefinisian ide, aktor dan konteks dimaksudkan untuk membantu memahami dan menjelaskan wujud implementasi kebijakan luar negeri. Ide merupakan hal yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan luar negeri tersebut. Aktor merupakan negara yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Konteks diartikan sebagai aktor yang lainnya dan seperangkat hubungan yang mereka mainkan.²⁵ Konteks akan memiliki arti yang berbeda jika dihadapkan pada aktor yang berbeda pula tergantung kepada beberapa hal yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya lingkungan dimana aktor berada saat itu, tapi juga bagaimana mereka mengartikan paksaan dan kesempatan yang ditawarkan dalam wilayah di sekitar mereka.²⁶ Adanya perbedaan aktor, interaksi mereka dan sekumpulan kepentingan yang kompleks menjadikan lingkup internasional sebagai wilayah yang tidak dapat diprediksi bagi kebijakan luar negeri. Pencapaian tujuan kebijakan luar negeri tergantung pada bagaimana menempatkan aktor dalam wilayah

²⁴ Ibid, hal 120

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

tersebut dengan strategis dan memberikan posisinya dalam hubungan terdapat konteks.²⁷

b. Hubungan antara Aktor dan Konteks

Kebijakan luar negeri merupakan hasil dari saling mempengaruhi antara aktor dan konteks yang terjadi secara konstan atau terus menerus.²⁸ Hubungan saling mempengaruhi ini tidak hanya dalam bentuk materil tapi juga dalam bentuk ide dan diskursus. Menjadi hal yang penting untuk tidak hanya memperhitungkan cara konteks merespon perilaku aktor, tapi juga cara respon yang disaring melalui persepsi, paradigma, dan narasi yang akhirnya terinternalisasi dalam proses politik.²⁹

c. Feedback

Feedback akan muncul sebagai hasil dari hubungan konstan saling mempengaruhi antara aktor dan konteks, juga akan terdapat *feedback* dari aktor terhadap konteks dan sebaliknya.³⁰ Proses yang interaktif akan menghasilkan *feedback* terhadap aktor dan konteks, mempengaruhi lingkungan, dan aktor itu sendiri dengan melakukan adaptasi. Menurut hellmann dan Jorgensen feedback itu adalah menganalisa bagaimana kebijakan luar negeri mempengaruhi lingkungan negara dan bagaimana pengaruh ini memberikan *feedback* pada proses pembuatan kebijakan luar negeri dan bagaimana dampaknya pada kebijakan luar negeri.³¹

²⁷ ibid

²⁸ ibid

²⁹ ibid

³⁰ Ibid

³¹ Frank Badinger and Dirk Petters, “*feedback Loops as a Link between foreign Policy and International Relations: The US War and Terror*”, 2015, hal 4

Terdapat dua cara dimana aktor mengadaptasikan domestik dalam implementasi luar negeri, yang pertama yaitu implementasi tidak hanya merupakan kemampuan negara untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri tetapi lebih kepada kemampuan pemerintah untuk memaksakan dan memberdayakan sumber daya masyarakat yang ada di negaranya baik itu materil maupun nonmateri untuk menjadi bagian dalam kebijakan luar negeri secara langsung maupun tidak langsung. Kedua dalam masyarakat yang demokratis, domestik merupakan gambaran konsesus implementasi yang digunakan untuk mendorong kebutuhan proyeksi pencapaian tujuan kebijakan luar negeri.

Perilaku kebijakan luar negeri juga memberikan *feedback* terhadap konteks dengan merestrukturisasi lingkungannya atau tidak mengalami perubahan.³² *Feedback* yang diberikan konteks terhadap aktor dapat dilihat pada bagaimana pengimplementasian kebijakan luar negeri tersebut. *Feedback* disini dimaksudkan pada berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri tersebut.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis³³. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu³⁴. Metodologi yang digunakan dalam penelitian menggunakan model pendekatan deskriptif-analisis, yaitu

³² Smith, hal 122

³³ Prof. Dr. Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal 41

³⁴ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)

pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah maupun yang sedang terjadi dengan menggunakan data yang deskriptif berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai kejadian yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti.³⁵

1.8.1 Batasan Masalah

Penentuan batasan penelitian dilakukan agar penelitian ini tidak keluar dari dan meluas dari kerangka dan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Vietnam dalam meliberalisasi perdagangan melalui WTO tahun 1995 hingga 2007.

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisa

Unit analisa adalah objek yang perilakunya hendak kita teliti. Unit ekplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan³⁶. Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti perilakunya adalah kebijakan luar negeri Vietnam sedangkan unit eksplanasi nya adalah liberalisasi perdagangan dan rezim perdagangan bebas WTO. Sedangkan tingkat analisa dari penelitian ini adalah sistem internasional dimana kebijakan luar negeri Vietnam dalam meliberalisasi perdagangan melalui rezim internasional akan menjadi fokus pada penelitian ini.

³⁵Dr. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000),6

³⁶Mochtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*", Jakarta: LP3ES,1990, hal 35-39

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang mendukung penelitian. Penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, dan artikel yang diambil melalui internet dan perpustakaan.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Mengingat banyaknya sumber informasi yang diperoleh, maka dalam penelitian ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber, dokumen dan informasi yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian dan kemudian dokumen dan informasi di deskripsikan secara tekstual. Melalui prosedur kualitatif, data-data dianalisis, menetapkan, menguraikan, dan mendokumentasikan alur sebab/konteks dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna yang terkandung di dalamnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip Moleong,³⁷ adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006.)

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

I.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB ini menggambarkan secara keseluruhan latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual dan teoritik yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Reformasi Ekonomi Vietnam

BAB ini akan berisikan tentang reformasi ekonomi yang terjadi di Vietnam

BAB III Kebijakan Luar Negeri Vietnam

Bab ini berisikan penjelasan mengenai dinamika kebijakan luar negeri Vietnam sebelum dan sesudah Doi Moi

BAB IV Analisis Kebijakan luar Negeri Vietnam dalam meliberalisasi perdagangan melalui Rezim Perdagangan Bebas WTO

Bab ini akan berisikan mengenai elaborasi teori dan konsep yang dipakai peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana Kebijakan

luar negeri Vietnam dalam meliberalisasi perdagangan melalui rezim perdagangan bebas WTO.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran pada penelitian ini,

